**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMASUKI OBYEK TANAH MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR
121/PID.SUS/2023/PN TKA)**

Rudy Mulyono

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 044203995@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted 25 Februari 2025

Accepted 4 Maret 2025

Published 5 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan lepas terhadap tindak pidana memasuki obyek tanah milik orang lain tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hakim dalam perkara pidana tersebut mempertimbangkan bukti surat yaitu berupa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka yang merupakan Perkara perdata antara H. Manggaukang Dg Kulle (Ayah pelapor Saksi Zainal) dan Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dengan putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). Hal tersebut berarti di dalam perkara tersebut terdapat kesalahan formil sehingga dalam perkara tersebut tidak diperiksa pokok perkara, sehingga tidak dapat ditemui siapa yang menjadi pemilik atau yang berhak atas tanah yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Lassang Barat, Kabupaten Takalar. Untuk mengetahui siapa pemilik sah atas obyek sengketa haruslah ditempuh lagi secara perdata. Penulis berpendapat bahwa judex facti pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini sengketa tanah antara Terdakwa dan saksi Pelapor harus diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkup hukum Keperdataan, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata-Kata Kunci: putusan lepas, tindak pidana, memasuki, tanah, orang lain.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu standar aturan yang ditetapkan, terdiri dari berbagai jenis pedoman yang mengontrol agar perbedaan kepentingan antara individu, masyarakat dan negara dapat diakomodir, bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Herlan dan Rahaditya, 2020). Menurut Wahyuni (2017), “secara umum hukum pidana berguna untuk membuat kehidupan masyarakat supaya dapat terwujud dan terpeliharanya ketertiban umum” (p.7). Berbagai tindak pidana terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana memasuki obyek tanah milik orang lain tanpa izin.

Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana mengatur bahwa, “barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”. Menurut R Soesilo (dalam Liuw, Lembong, dan Mewengkang, 2020), “kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut sebagai “*huisvredebreuk*” berarti pelanggaran atau kejahatan dalam hak kebebasan rumah tangga” (p.147). Biasanya Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana tersebut juga seringkali diterapkan pada kasus penyerobotan tanah (Rahmaswary dan Ngadino, 2019). Menurut Tumilaar (2018), “berdasarkan sudut pandang pembentuk Pasal 167 KUHPidana, dalam pergaulan hidup sehari-hari, orang boleh memasuki tanah dan rumah orang lain yang ada penghuninya; yang lazimnya memang tidak mencantumkan tulisan dilarang masuk—orang yang memasuki tanah dan rumah orang lain tersebut belum melakukan suatu tindak pidana,

apabila oleh penghuni rumah ia diminta meninggalkan rumah atau tanahnya dan tidak dipatuhi dengan segera, barulah hal tidak mematuhi permintaan tersebut merupakan tindak pidana” (p.12).

Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka, Terdakwa dalam perkara ini adalah Sumakkara Dg Rowa. Terdakwa didakwa bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan Terdakwa dalam perkara tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Herlan dan Rahaditya (2020), “ketika seorang hakim memutus perkara harus selalu dituntut untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengelompokkan hukum dan peraturan yang terkait dengan pokok perkara, dan menetapkan hukum dari perkara itu sehingga dalam membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi seorang/individu dengan dasar pertimbangan yang konkrit sehingga tidak menimbulkan suatu kepincangan hukum” (p.1240). Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202).

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pertimbangan Hakim pada putusan lepas terhadap tindak pidana memasuki obyek tanah milik orang lain tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan Hakim pada putusan lepas terhadap tindak pidana memasuki obyek tanah milik orang lain tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara (Marzuki, 2017). Menurut Marzuki (2017) “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada” (p.137). Karya ilmiah ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus posisi berawal ketika terdakwa masuk ke obyek tanah milik ahli waris Rumbia Dg. Ngawing (Alm) pada tahun 2018 dengan cara menyuruh keluar saksi Saringai Dg. Ngai dari obyek tanah tersebut, yang mana saksi Saringai Dg. Ngai sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 telah mengarap obyek tanah itu karena disuruh oleh Rumbia Dg. Ngawing (Alm) dengan cara bercocok tanam seperti menanam ubi dan jagung. Adapun terdakwa menyuruh saksi Saringai Dg. Ngai keluar dari obyek tanah itu, karena terdakwa menganggap dirinya

sebagai pemilik dari obyek tanah itu yang didapat dari Santari Bin Baha (bapak terdakwa) sejak tahun 1968.

Mengetahui obyek tanah milik ahli waris Rumbia Dg. Ngawing (Alm), saksi Zainal selaku penerima kuasa dari ahli waris Rumbia Dg. Ngawing mengirimkan surat somasi pertama tertanggal 28 Desember 2020 dan surat somasi kedua tanggal 04 Januari 2022 pada terdakwa dengan maksud agar terdakwa keluar dan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan diatas obyek tanah tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan kedua somasi yang dikirim oleh saksi Zainal selaku penerima kuasa dari ahli waris Rumbia Dg. Ngawing. Adapun alas hak yang dimiliki oleh saksi Zainal selaku penerima kuasa dari ahli waris Rumbia Dg. Ngawing (alm) adalah adanya sertifikat hak milik nomor 00787 Desa Lassang Barat dengan luas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) tertanggal 19 Pebruari 1986 atas nama Rumbia Bin Pangempang. Akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi Zainal selaku penerima kuasa dari ahli waris Rumbia Dg. Ngawing mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sumakkara Dg. Rowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumakkara Dg. Rowa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan/lapas;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa, dst... tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka pada intinya memberikan putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sumakkara Dg Rowa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa, dst... tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Analisis Putusan PN Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Menurut Adonara (2015), putusan hakim setidaknya memiliki tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa sesuai dengan kecocokan fakta hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pertama, “unsur barang siapa”. Majelis Hakim menimbang, bahwa Terdakwa Sumakkara Dg Rowa selama diperiksa di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang

diajukan serta memberikan keterangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sumakkara Dg Rowa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi oleh diri Terdakwa. Sebagaimana menurut Kanter dan Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandangnya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab.” (p.102).

Kedua, “unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”. Majelis Hakim menimbang, yang dimaksud dengan memaksa-masuk ialah “memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain si pemakai sekaligus merupakan si pihak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lajim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam dan apabila pintu dari suatu rumah terbuka lebar, tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki”. Menurut Tumilaar (2018), “apabila si pihak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus” (p.7).

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memasuki pekarangan di Dusun Mattoangin Desa Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar secara sepihak dan di luar hukum telah memenuhi unsur “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”, sehingga unsur kedua telah terpenuhi. Majelis Hakim menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat di dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, perlu diuraikan terlebih dahulu apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata.”

“Menimbang bahwa setelah memeriksa berkas perkara, penuntut umum juga mengajukan bukti surat lain yaitu berupa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka yang setelah diteliti merupakan Perkara perdata antara H. Manggaukang Dg Kulle (Ayah pelapor Saksi Zainal) dan Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dan setelah majelis hakim mempelajari putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka, maka majelis hakim berpendapat perkara antara pelapor dengan terdakwa itu tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).”

“Menimbang bahwa di dalam ranah hukum perdata, Putusan itu tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) itu berarti di dalam perkara tersebut terdapat kesalahan formil sehingga dalam perkara tersebut tidak diperiksa pokok perkara sehingga tidak dapat ditemui siapa yang menjadi pemilik atau yang berhak atas tanah yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Lassang Barat,

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga untuk mengetahui siapa pemilik sah atas obyek sengketa haruslah ditempuh lagi secara perdata.”

Menurut Amiruddin, Pancanigrum dan Purnomo (2021), “bertumpu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” (p.58). Dalam perkara ini bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, namun perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena telah kehilangan sifat melawan hukum materiil. Antara Terdakwa dengan saksi Pelapor merupakan perkara perdata, suatu persoalan mengenai hak atas kepemilikan tanah yang belum jelas ditentukan siapa pemiliknya.

Permasalahan atau sengketa tanah sangat beragam, mulai dari sengketa sertipikat hingga sengketa kepemilikan tanah (Roni, dkk, 2023). Hal tersebut dapat mencakup pendudukan tanah yang tidak sah atau perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak. Liuw, Lembong, dan Mewengkang (2020) menyatakan bahwa “Tindak Pidana Memasuki Rumah atau pekarangan secara paksa yang dapat juga diartikan sebagai penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya” (p151). Penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Roni dkk (2023) menyatakan bahwa “Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum” (p.68).

Herlan dan Rahaditya (2020) menyatakan bahwa “banyaknya kasus pertanahan yang masuk ke ranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun jaksa/penuntut umum patut lebih cermat dalam menangani dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, sehingga mencegah adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum, misalnya pada perkara penyerobotan tanah” (p.1242). Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa antara Saksi Pelapor dan terdakwa haruslah diselesaikan terlebih dahulu perkara perdata sehingga untuk menilai bersalah atau tidak perbuatan terdakwa harus melalui ranah hukum perdata maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*). Hal tersebut berarti sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah perdata.

Putusan pengadilan yang berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP) maupun putusan pemidanaan, bukanlah sebuah putusan yang muncul begitu saja walaupun ada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim, melainkan harus melalui proses peradilan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana (Saleh, 2019). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Hakim (2019) menyatakan “untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah

melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Adil merupakan hakikat terminologi dari penataan hukum dan peradilan, oleh karena itu tata hukum dan peradilan tidak bisa diwujudkan begitu saja dengan mengabaikan keadilan (Adonara, 2015). Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam perkara pidana tersebut, terdapat bukti surat yaitu berupa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka yang merupakan Perkara perdata antara H. Manggaukang Dg Kulle (Ayah pelapor Saksi Zainal) dan Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Hal tersebut berarti di dalam perkara tersebut terdapat kesalahan formil sehingga dalam perkara tersebut tidak diperiksa pokok perkara, sehingga tidak dapat ditemui siapa yang menjadi pemilik atau yang berhak atas tanah yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga untuk mengetahui siapa pemilik sah atas obyek sengketa haruslah ditempuh lagi secara perdata. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena sengketa tanah antara Terdakwa dan saksi Pelapor harus diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkup hukum Keperdataan terkait hak kepemilikan tanah, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yaitu berupa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka yang merupakan Perkara perdata antara H. Manggaukang Dg Kulle (Ayah pelapor Saksi Zainal) dan Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dengan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Hal tersebut berarti di dalam perkara tersebut terdapat kesalahan formil sehingga dalam perkara tersebut tidak diperiksa pokok perkara, sehingga tidak dapat ditemui siapa yang menjadi pemilik atau yang berhak atas tanah yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga untuk mengetahui siapa pemilik sah atas obyek sengketa haruslah ditempuh lagi secara perdata. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini sengketa tanah antara Terdakwa dan saksi Pelapor harus diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkup hukum Keperdataan terkait hak kepemilikan tanah, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Saran

Dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah atau tindak pidana memasuki obyek tanah milik orang lain tanpa izin, hakim harus berpedoman pada asas keadilan. Penyidik maupun jaksa/penuntut umum patut lebih cermat dalam menangani dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, demi mencegah adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Adonara, F.F. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 12 (2), 217-236.
- Amiruddin, Pancanigrum, R.K., dan Purnomo, C.E. (2021). "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1), 58-65.
- Herlan, N.M., dan Rahaditya, R. (2020). "Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/PID/2019/PT.DKI)". *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1239-1259.
- Liuw, H.M.L., Lembong, J., dan Mewengkang, F.R. (2020). "Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia". *Lex Privatum*, 9(13), 147-156.
- Rahmaswary, D., dan Ngadino. (2019). "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/Ptun-BI)". *Jurnal Notarius*, 12(2), 731-742.
- Roni, dkk. (2023). "Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya". *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 65-70.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.
- Tumilaar, H.M.M. (2018). "Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, 8(1), 5-16.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tka.